BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Pemberdayaan

Pemberdayaan sebagai suatu gerakan yang menekankan kepada kemandirian pada objek masyarakat langsung dan mendapatkan dukungan dari pemerintah dalam bentuk kebijakan sering bertolak belakang dengan kenyataan yang dialami saat sekarang, dimana kebijakan maupun program pemerintah belum memiliki arah yang tepat sasaran. Pelaksanaan program-program pemerintah dengan tujuan utama dapat menyentuh masyarakat langsung tidak dapat terealisasi dengan baik, dengan faktor utama karena masalah maupun metode tidak melihat aspek dari kemampuan dan pengetahuan masyarakat itu sendiri.

Konsep pemberdayaan dalam wacana pembangunan masyarakat selalu dihubungkan dengan konsep mandiri, partisipasi, jaringan kerja dan keadilan. Pada dasarnya, pemberdayaan diletakkan pada kekuatan tingkat individu dan social.

> "Pemberdayaan diartikan sebagai pemahaman secara psikologis pengaruh kontrol individu terhadap keadaan social, kekuatan politik, dan hak-hak nya menurut undang-undang".
> (Rapoport dalam Hikmat, 2006:3)

Uraian diatas dijelaskan bahwa pemberdayaan diartikan sebagai proses dalam pengambilan keputusan guna memandirikan diri mereka sendiri guna mencapai suatu tujuan keberhasilan dan kepercayaan diri terhadap kemampuan individu untuk menjauhkan diri dari sikap diskriminasi kelompok-kelompok

tertentu. Terkadang teori berbanding terbalik dengan kenyataan yang ada dilapangan, yaitu masih kurangnya kesadaran dari pedagang mengenai pentingnya sebuah bimtek yang diberikan oleh Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung yang bertujuan untuk mebekalkan pedagang agar lebih siap dalam persaingan pasar, inovatif dan mandiri. Namun upaya tersebut kurang diserap baik oleh pedagang sehingga keluhan mereka terhadap penurunan pendapatan terjadi karena mereka belum siap untuk bersaing dengan jualan tanpa adanya sebuah inovasi.

> "Pemberdayaan juga merupakan suatu proses yang menyangkut hubungan kekuasaan kekuatan yang berubah antar individu, kelompok dan lembaga. Pemberdayaan lebih mudah dijelaskan pada saat manusia dalam keadaan powerlessness (baik dalam keadaan aktual atau sekedar perasaan), tidak berdaya, tidak mampu menolong diri sendiri, kehilangan kemampuan untuk mengendalikan kehidupan sendiri".
> (Prijono, 1996:54)

Jadi menurut definisi diatas dijelaskan bahwa pemberdayaan adalah sesuatu yang menyangkut tentang proses, cara dan tindakan untuk memberdayakan seseorang. Dan merupakan suatu upaya yang harus diikuti dengan tetap memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh setiap masyarakat. dalam rangka itu pula diperlukan langkah-langkah yang lebih positif. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata dan menyangkut penyediaan berbagai masukan serta membuka akses kepada berbagai peluang yang nantinya dapat membuat masyarakat menjadi semakin berdaya.

Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung sudah berupaya dengan maksimal mengenai proses pemberdayaan terhadap PKL *Skywalk* Teras Cihampelas, namun ada beberapa kendala mengenai sebuah upaya atau program yang diberikan oleh Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung kepada PKL *Skywalk* Teras Cihampelas

karena kurangnya kesadaran dari para PKL *Skywalk* Teras Cihampelas tentang pentingnya sebuah program pemberdayaan yang diberikan oleh dinas.

Pemberdayaan memuat dua pengertian kunci, yakni kekuasaan dan kelompok lemah. Kekuasaan disini diartikan bukan hanya menyangkut kekuasaan politik dalam arti sempit, melainkan kekuasaan atau penguasaan klien atas:

1. Pilihan-pilihan personal dan kesempatan-kesempatan hidup
2. kemampuan dalam membuat keputusan-keputusan mengenai gaya hidup, tempat tinggal, pekerjaan.
3. Pendefinisian kebutuhan: kemampuan menentukan kebutuhan selaras dengan aprisiasi dan keinginannya.
4. Ide atau gagasan: kemampuan mengekspresikan dan menyumbangkan gagasan dalam suatu forum atau diskusi secara bebas dan tanpa tekanan.
5. Lembaga-lembaga: kemampuan menjangkau, menggunakan dan mempengaruhi pranata-pranata masyarakat, seperti Lembaga kesejahteraan social, Pendidikan dan kesehatan.
6. Sumber-sumber: kemampuan memobilisasi sumber-sumber formal, informal dan kemasyarakatan.
7. Aktivitas ekonomi: kemampuan memanfaatkan dan mengelola mekanisme produksi, distribusi dan pertukaran barang serta jasa.
8. Reproduksi: kemampuan dalam kaitannya dengan proses kelahiran, perawatan anak, Pendidikan dan sosialisai.

(Ife dalam Suharto, 2014:59)

Dengan demikian, pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk kepada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan social; yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi maupun social seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian,

berpartisipasi dalam kegiatan social, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

Pentingnya pemberdayaan sebagai strategi dalam pembangunan social yang merupakan respon dari pembangunan ekonomi yang telah lama model-model pembangunan. Paradigma pembangunan ekonomi ternyata perlu diimbangi pembangunan sosial; sebagai dikotomi yang saling terintergrasi dan komplementer.

> "…sistem ekonomi perlu di analisis dan didudukkan pada konteks sistem social secara keseluruhan di negara tertentu, dan tentu saja, juga dalam konteks global-international.sistem social yang dimaksud adalah hubungan-hubungan yang saling terkait antara faktor-faktor ekonomi dan non-ekonomi".
> (Todoro dalam Hikmat, 2010:62)

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa konsep *trickle down effect* "menetes ke bawah" yang cenderung bersifat *top-down* dianggap sebagai paradigma pembangunan yang konvensional. Sebaliknya, model-model pembangunan social yang lebih bersifat *bottom-up* dengan strategi pemenuhan kebutuhan masyarakat bawah (*grassroots*), agaknya lebih sesuai dengan kenyataan dilapangan.

Pemberdayaan dapat diartikan sebagai tujuan dan proses. Sebagai tujuan, pemberdayaan adalah suatu keadaan yang ingin dicapai, yakni masyarakat yang memiliki kekuatan atau kekuasaan dan keberdayaan yang mengarah pada kemandirian sesuai dengan tipe-tipe kekuasaan. Pemberdayaan sebagai proses memiliki lima dimensi yaitu:

1. Pemungkinan adalah menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal.

Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat struktural dan kultural yang menghambat.

2. Penguatan adalah penguatan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuh kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian.
3. Perlindungan yaitu melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok-kelompok kuat dan dominan, menghindari persaingan yang tidak seimbang, mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap yang lemah. Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan masyarakat kecil. Pemberdayaan harus melindungi kelompok lemah, minoritas dan masyarakat terasing.
4. Penyokongan yaitu pemberian bimbingan dan dukungan kepada masyarakat lemah agar mampu menjalankan peran dan fungsi kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh ke dalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.
5. Pemeliharaan yaitu memelihara kondisi kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keseimbangan dan keselarasan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan usaha.

(Suharto, 2014:67-68)

Menurut kutipan diatas menyatakan bahwa pemberdayaan harus memberikan kekuatan atau otoritas kepada pihak yang lemah atau belum berdaya. diberikannya kekuatan atau otoritas tersebut diharapkan pihak yang belum berdaya tersebut bisa memiliki kekuatan untuk meningkatkan kemampuannya.

Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Pemberdayaan masyarakat hanya bisa terjadi apabila warganya ikut berpartisipasi. Suatu usaha hanya berhasil dinilai sebagai "pemberdayaan masyarakat" apabila kelompok komunitas atau masyarakat tersebut menjadi agen pembangunan atau dikenal juga sebagai subjek. Disini

subjek merupakan motor penggerak, dan bukan penerima manfaat Pengembangan masyarakat lokal sebagai proses dalam suatu pemberdayaan masyarakat, yang mengarahkan pada penciptaan kemajuan sosial dan ekonomi bagi masyarakat lokal tersebut melalui partisipasi aktif serta inisiatif anggota masyarakat lokal itu sendiri.

Secara sosiologis keberdayaan masyarakat diartikan sebagai memberikan power kepada mereka yang lemah dalam pencapaian suatu target dan pemecahan suatu masalah bisa melalui pemberdayaan. “sistem dan kekuasaan yang menjadi manifestasi dari determinisme sendiri, terbukti ada variasi dalam sikap dan pandangan. *Pertama,* siap radikal, yakni tindakan yang menihilsasikan segala apa yang dinamakan sistem, dana pa yang dinamakan *power*. Saat itu gerakan yang dikenal adalah *power to nobody*. *Kedua,* pendekatan yang menyatakan bahwa kekuasaan dan sistem harus dipegang semua orang secara sama *(power to everybody)*. Pendekatan ini akhirnya bermuara pada situasi anarki atau power tanpa norma dan etika yang disepakati bersama. *Ketiga,* pendekatan yang berorinsip kepada gagasan yang penting adalah memberikan *power* kepada yang *powerless*. Hanya dengan memiliki *power*, mereka yang terhimpit dalam ketidakberdayaan *(powerless)* itu akan dapat melaksanakan proses aktualisasi eksistensi dirinya” (Vindhyanika dalam hikmat, 2010:46).

Konsep pemberdayaan tidak hanya mengarah kepada individual *(individual self-empowerment),* tetapi juga secara kolektif *(collective self empowerment).* Semua itu harus menjadi bagian dari aktualisasi diri *(self actualization)* dan koaktualisasi eksistensi manusia dan kemanusiaan. Dengan

perkataan lain, manusia dan kemanusiaanlah yang menjadi tolak ukur normative, structural, dan substansial.

> *"many client's oppression by and alienation from powerful groups in society is better recognized, as in the close relationship of social workers and their agencies with those groups".*
> (Payne dalam Hikmat, 2010:46).

Dari uraian diatas, garis-garis besar pendekatan pemberdayaan menegaskan tentang makna penting dan perlunya power, dan juga menekankan keberpihakkan kepada powerless. Semua pihak dapat memiliki kekuatan yang menjadi modal dasar bagi pelaksanaan pemberdayaan, manusia memang perlu adanya mengembangkan peluang dan meraih kesempatan untuk bisa mengaktualisasikan eksistensinya. Bagaimanapun, aktualisasi diri merupakan kebutuhan dasar manusia yang tidak dapat dipungkiri. pemberdayaan harus mengikuti pendekatan-pendekatan sebagai berikut:

1. upaya pemberdayaan harus terarah (targeted)
2. program pemberdayaan harus langsung mengikutsertakan atau bahkan dilaksanakan oleh masyarakat yang menjadi sasaran.
3. menggunakan pendekatan kelompok.

(Kartasasmita, 1997:29)

Menurut uraian diatas pendekatan-pendekatan dalam pemberdayaan itu harus memperhatikan bagaimana upaya tersebut sampai kepada sasaran dengan program pemberdayaan yang dilaksanakan oleh Lembaga terkait dengan sasaran kepada masyarakat yang dituju menggunakan pendekatan secara kelompok agar terciptanya keselarasan dalam program pemberdayaan dengan maksud dan tujuan untuk memandirikan kelompok-kelompok tertentu. Sesuai dengan Visi Pemberdayaan Masyarakat Terwujudnya Kemandirian Masyarakat Yang

Berbasis Kepada Pembangunan Manusia Seutuhnya Menuju Kesejahteraan Masyarakat.

Pentingnya Pemberdayaan Masyarakat dinilai dari pembangunan social yang merupakan respons dari model-model pembangunan yang mendominasi. seperti yang dijelaskan dalam teori berikut:

> "…sistem ekonomi perlu di analisis dan didudukkan pada konteks sistem social secara keseluruhan dinegara tertentu, dan tentu saja, juga dalam konteks global-internasional. Sistem social yang dimaksud adalah hubungan-hubungan yang saling terkait antara factor-faktor ekonomi dan non-ekonomi".
> (Todaro dalam Hikmat, 2010:62).

Dari uraian diatas pemberdayaan masyarakat adalah proses yang dirancang untuk menciptakan kondisi sosial ekonomi yang lebih maju bagi seluruh masyarakat dengan mengutamakan partisipasi, pembinaan yang berdasarkan motivasi dan kepercayaan yang penuh terhadap kemampuan mereka sendiri dengan berorientasi pada sistem ekonomi.

Ada lima pendekatan dalam Pemberdayaan Masyarakat untuk dapat memberdayakan dengan pendekatan-pendekatan berikut:

1. Pendekatan dari bawah (*buttom up approach*) pada kondisi ini pengelolaan dan para stakeholder setuju pada tujuan yang ingin dicapai untuk kemudian mengembangkan gagasan dan beberapa kegiatan setahap demi setahap untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya.
2. Partisipasi (*participation*) dimana setiap aktor yang terlibat memiliki kekuasaan dalam setiap fase perencanaan dan pengelolaan.
3. Konsep keberlanjutan merupakan pengembangan kemitraan dengan seluruh lapisan masyarakat sehingga program pembangunan berkelanjutan dapat diterima secara sosial dan ekonomi.
4. Keterpaduan yaitu kebijakan dan strategi pada tingkat lokal, regional dan nasional.
5. Keuntungan sosial dan ekonomi: merupakan bagian dari program pengelolaan.

(Drijver dalam Sutrisno, 2005:18)

Menurut uraian diatas bahwa pemberdayaan masyarakat harus memiliki kekuatan pendekatan dari bawah agar mampu menjangkau segala lapisan masyarakat dengan keterlibatan partisipasi dari masyarakat bahkan Dinas terkait agar mampu menerapkan konsep keberlanjutan pengembangan kemandirian masyarakat dengan strategi social ekonomi yang kuat.

2.1.1.1 Pemecahan Masalah Melalui Proses Pemberdayaan

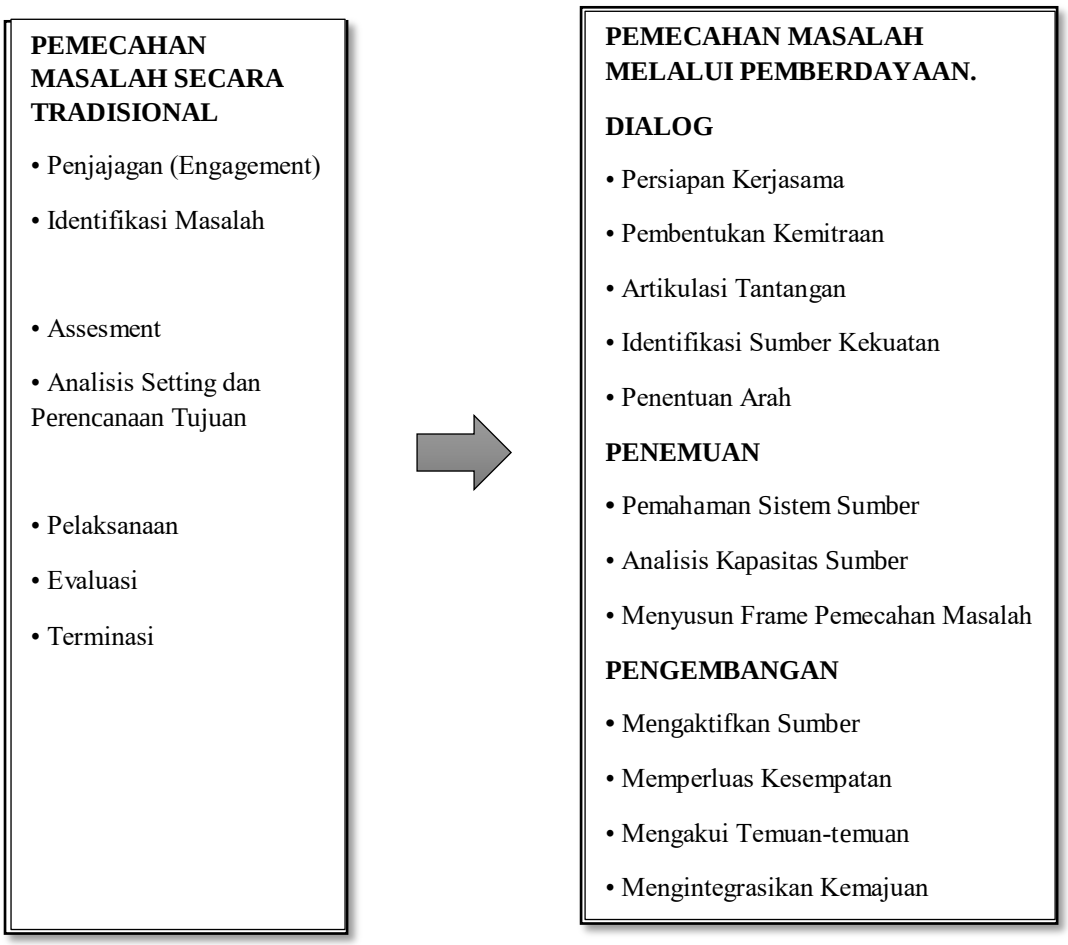
Kata pemberdayaan (*empowerment*) mengesankan arti apa adanya sikap mental yang tangguh atau kuat. "Praktek dan kegiatan yang berbasiskan pemberdayaan adalah Bahasa pertolongan yang diungkapkan dalam bentuk simbol-simbol. Simbol-simbol tersebut kemudian mengkomunikasikan kekuatan yang tangguh untuk mengubah hal-hal yang terkandung dalam diri kita (*inner space*), orang-orang lain yang kita anggap penting, serta masyarakat disekitar kita". (Rapaport dalam Hikmat 2010:43).

Menurut pemikiran diatas secara keseluruhan akan dapat memperkaya dan menjiwai pemahaman global mengenai pemberdayaan sehingga akan membawa dampak yang sangat luas, baik terhadap kecenderungan primer maupun sekunder dari makna pemberdayaan.

Paparan berikut adalah proses pendekatan yang dilakukan dalam pekerjaan sosial mulai dari pekerjaan yang bersifat tradisional sampai dengan pekerjaan yang merefleksikan praktek berbasiskan pemberdayaan, yang menjabarkan model sistem strategi pemberdayaan masyarakat disajikan dalam gambar berikut:

Gambar 2.1

Model Sistem Strategi Pemberdayaan Masyarakat



Sumber: (Dubois dalam Hikmat, 2010:45)

Berdasarkan konsep tersebut menjabarkan proses pemberdayaan secara umum meliputi kegiatan-kegiatan berikut.

1. Merumuskan Relasi kemitraan
2. Mengartikulasikan tantangan-tantangan dan mengidentifikasi berbagai kekuatan yang ada
3. Mengidentifikasi arah yang ditetapkan
4. Mengeksplorasi sistem-sistem sumber
5. Menganalisis kapabilitas sumber
6. Menyusun frame pemecahan masalah

7. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber dan memperluas kesempatan-kesempatan
8. Mengakui temuan-temuan
9. Mengintegrasikan kemajuan-kemajuan yang telah dicapai

Dari uraian diatas, proses pemecahan masalah yang berbasiskan pemberdayaan masyarakat berdasarkan prinsip kerja bersama masyarakat dapat disadari bahwa masyarakat mempunyai hak-hak yang harus dihargai dan dipatuhi.

2.1.1.2 Tahap-Tahap Pemberdayaan

Tahapan pemberdayaan bertujuan kepada kesadaran diri untuk berubah, kemauan dan keberanian untuk berubah dan merubah nasib, kemauan untuk berpartisipasi, di motivasi dan memotivasi diri untuk berubah kearah yang lebih baik dan maju sehingga menimbulkan kompetisi untuk berhasil. Pemberdayaan tidak bersifat selamanya, melainkan sampai target masyarakat mampu untuk mandiri, meski dari jauh di jaga agar tidak jatuh lagi. (Sumodiningrat dalam Teguh, 2004:82).

Dilihat dari pendapat tersebut berarti pemberdayaan melalui suatu masa proses belajar hingga mencapai status mandiri, meskipun demikian dalam rangka mencapai kemandirian tersebut tetap dilakukan pemeliharaan semangat, kondisi dan kemampuan secara terus menerus supaya tidak mengalami kemunduran lagi. Sebagaimana disampaikan dimuka bahwa proses belajar dalam rangka pemberdayaan masyarakat akan berlangsung secara bertahap. Tahap-tahap yang harus dilalui tersebut adalah meliputi:

1. Tahap penyadaran dan tahap pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan kapasitas diri.

2. Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan.
3. Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian.

(Sumodiningrat dalam Teguh, 2004:82).

Dari uraian diatas dijelaskan bahwa tahapan-tahapan pemberdayaan meliputi tiga tahapan yang bertujuan untuk membentuk perilaku kesadaran dan kepedulian sehingga mempotensikan kapasitas diri dan juga berupa wawasan dan intelektual guna mengasah keterampilan dasar dan membentuk kemampuan untuk mewujudkan kapasitas diri yang lebih inovatif agar mampu bersaing secara kreatif.

2.1.1.3 Tujuan Pemberdayaan

Semua konsep pemberdayaan pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mandiri. Namun kesejahteraan tersebut ingin dicapai dengan membangun masyarakat dan sesuai dengan martabat kemanusiaan dalam rangka Pembangunan Nasional. Karena pada dasarnya setiap manusia atau masyarakat berkeinginan untuk membangun kehidupan dan meningkatkan kesejahteraannya. Dengan berlandaskan pada kemampuan dan potensi yang dimilikinya, sehingga masyarakat yang dikatan lemah dan tidak berdaya akan menjadi berdaya. Berdasarkan pandangan tersebut, maka konsep pemberdayaan harus bertumpu pada manusia dan berakar kerakyatan melalui program atau kegiatan yang dapat membuat masyarakat lebih berdaya.

Tujuan pemberdayaan menurut pendapat dalam buku Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat mengatakan :

> "Tujuan pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya".
> (Suharto, 2014:60)

Pendapat di atas menjelaskan bahwa pemberdayaan merujuk kepada hasil yang ingin dan akan dicapai dalam perubahan sosial yang berupa masyarakat yang berdaya, sehingga memiliki kekuasaan atau kemampuan pengetahuan dan keterampilan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat ekonomi, fisik, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, maupun menyampaikan aspirasi, maupun mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mandiri melaksnakan berbagai tugas-tugas kehidupannya yang semestinya harus dijalani.

Setiap aktivitas yang dilakukan oleh individu maupun organisasi pasti memiliki tujuan. Demikian pula dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Di dalam bukunya yang berjudul Dialektika Pembangunan dengan Pemberdayaan, Menjelaskan sebagai berikut :

> "Tujuan akhir dari pemberdayaan masyarakat dalah untuk meningkatkan harkat dan martabat hidup manusia, dengan kata lain secara sederhana untuk meningkatkan kualitas hidup. Perbaikan kualitas hidup tersebut bukan semata menyangkut aspek ekonomi, tetapi juga fisik, mental, politik, keamanan, dan sosial budaya"
> (Soleh, 214:81)

Pendapat diatas menjelaskan bahwa tujuan akhir pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat, dengan kata lain memampukan dan memandirikan masyarakat dari yang tidak berdaya menjadi lebih berdaya dengan perbaikan aspek-aspek kualitas hidupnya. Beliau pun menjelaskan secara rinci untuk mencapai tujuan yang bersifat umum tersebut, terdapat beberapa sasaran antara lain yaitu :

1. Perbaikan kelembagaan. Hal ini dimaksudkan agar terjalin kerjasama dan kemitraan antar pemangku kepentingan. Melalui beberapa perbaikan kelembagaan, berbagai inovasi sosial yang dilakukan secara kemitraan antar pemangku kepentingan dapat meningkatkan hasil produktifitas masyarakat
2. Perbaikan pendapatan, stabilitas ekonomi, keamanan, dan politik yang mutlak diperlukan untuk terlaksananya pembangunan yang berkelanjutan
3. Perbaikan lingkungan hidup. Disadari atau tidak dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya masyarakat melakukan aktivitas ekonomi yang berakibat terjadinya kerusakan lingkungan hidup. Kerusakan lingkungan ini bukan saja mengancam dirinya, tetapi juga mengancam kehidupan generasi yang akan datang.
4. Perbaikan akses, baik berkenaan dengan akses inovasi tekhnologi, permodalan/kredit, sarana dan prasarana produksi, peralatan dan mesin serta energi listrik yang sangat diperlukan dalam akses produksi. Demikian pula tidak kalah pentingnya perbaikan akses pasar dan jaminan harga serta pengambilan keputusan politik
5. Perbaikan tindakan. Melalui pendidikan, kualitas SDM dapat ditingkatkan sehingga dari sana diharapkan akan berdampak pada perbaikan sikap dan tindakan yang lebih bermartabat
6. Perbaikan usaha produktif. Melalui upaya pendidikan dan latihan dan perbaikan kelembagaan serta akses perkreditan, diharapkan usaha-usaha yang bersifat produktif akan lebih maju dan berdaya saing
7. Perbaikan bidang lainnya, sesuai dengan permaslahan yang dihadapi pada sebuah lingkungan masyarakat.
   (Soleh, 214:81)

Pendapat mengenai tujuan pemberdayaan yang dijelaskan oleh Soleh dapat dipahami, bahwa proses pemberdayaan mempunyai tujuan sebagai sebuah strategi peningkatan produktifitas masyarakat agar lebih meningkatkan kualitas hidupnya

melalui beberapa perbaikan yang menyangkut aspek ekonomi, fisik, mental, politik, keamanan dan sosial budaya.

2.1.1.4 Strategi Pemberdayaan

Strategi Pemberdayaan Masyarakat mengedepankan fasilitasi untuk meningkatkan partisipasi dan kemandirian masyarakat dalam pengelolaan program/kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Strategi yang diberikan oleh Pemerintah Kota Bandung berupa relokasi yang dengan tujuan diberdayakan tanpa dibinasakan dengan ditunjang oleh fasilitas *Skywalk* Teras Cihampelas berupa kios secara gratis, untuk pedagang kuliner yang didalamnya terdapat fasilitas dapur kecil dengan wastafel untuk cuci piring didalamnya, adanya toilet umum, dan tersedianya Badan Pengelola Teras Cihampelas (BPTC) sebagai penyambung aspirasi pedagang kepada aparatur yang bersangkutan, petugas keamanan dan kebersihan dan Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung berupa pemberdayaan yang mengedepankan program unggulan seperti bimtek yang bertujuan agar pedagang merasa lebih kreatif, inovatif dan mandiri.

> "Proses pemberdayaan umumnya dilakukan secara kolektif. Tidak ada literarur yang menyatakan bahwa proses pemberdayaan terjadi dalam relasi satu lawan satu antara pekerja social dan klien dalam setting pertolongan perseorangan. Meskipun pemberdayaan seperti ini dapat meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan diri klien, hal ini bukanlah strategi utama pemberdayaan"
> (Parsons dalam Hikmat, 1994:112-113).

Pendapat diatas menjelaskan bahwa suatu proses pemberdayaan tidak akan berhasil jika tanpa adanya campur tangan dari beberapa pihak yang saling

bekerjasama demi tercapainya suatu tujuan pemberdayaan yang berhasil guna meningkatkan kualitas hidup seseorang dengan upaya untuk memandirikan dan mengasah kemampuan diri agar terciptanya rasa percaya diri. Karena proses pemberdayaan menempatkan masyarakat sebagai subjek yang mampu menjangkau sumber-sumber dan kesempatan kompetensi yang diperoleh melalui pengalaman hidup. Masyarakat yang diberdayakan harus melihat diri mereka sendiri sebagai agen penting yang dapat mempengaruhi perubahan.

Dalam beberapa situasi, strategi pemberdayaan dapat saja dilakukan secara individual; meskipun pada gilirannya strategi inipun tetap berkaitan dengan kolektivitas, dalam arti mengkaitkan klien dengan sumber atau sistem lain diluar dirinya. Dalam konteks pekerjaan social, pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga aras atau matra pemberdayaan (*empowerment setting*): Mikro, Mezzo, Makro.

a. Aras mikro. Pemberdayaan dilakukan terhadap klien secara individu melalui bimbingan, konseling, *stress management*, *crisis intervention*. Tujuan utamanya adalah membimbing atau melatih klien dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya. Model ini sering disebut sebagai pendekatan yang berpusat pada tugas (*task centered approach*).
b. Aras mezzo. Pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok klien. Pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai media intervensi. Pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok, biasanya digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan dan sikap-sikap klien agar memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapinya.
c. Aras makro. Pendekatan ini disebut juga sebagai strategi sitem besar, karena sasaran perubahan diarahkan pada sistem lingkungan yang lebih luas. Perumusan kebijakan, perencanaan social, kampanye, aksi social, *lobbying*, pengorganisasian masyarakat, manajemen konflik adalah beberapa strategi dalam pendekatan ini. Strategi sistem besar memandang klien sebagai orang yang memiliki kompetensi untuk memahami situasi-situasi mereka sendiri dan untuk memilih serta menentukan strategi yang tepat untuk bertindak.
(Parsons dalam Hikmat. 1994, 66-67).

Menurut uraian diatas disimpulkan bahwa Pemberdayaan harus mencakup beberapa pendekatan-pendekatan agar mampu mewujudkan suatu tujuan masyarakat yang mandiri dan berani, dengan dibekalkan pelatihan dan Pendidikan yang mampu membangun keterampilan demi memcahkan permasalahan yang dihadapinya.

2.1.1.5 Prinsip Pemberdayaan Masyarakat

Prinsip Pemberdayaan Masyarakat adalah menumbuh kembangkan potensi Masyarakat, meningkatkan Kontribusi masyarakat dalam Pembangunan, mengembangkan gotong-royong, bekerja bersama masyarakat, berbasis masyarakat, kemitraan dan organisasi masyarakat lain serta desentralisasi. Keberadaan prinsip pemberdayaan masyarakat dapat menumbuhkan peran aktif masyarakat, sehingga serangkaian kegiatan pemberdayaan berjalan dengan baik. Adapun prinsip pemberdayaan masyarakat, terdapat 5 (lima) prinsip dasar dari konsep pemberdayaan masyarakat sebagai berikut:

1. Pemberdayaan masyarakat memerlukan break-even dalam setiap kegiatan yang dikelolanya, meskipun orientasinya berbeda dari organisasi bisnis, dimana dalam pemberdayaan masyarakat keuntungan yang diperoleh didistribusikan kembali dalam bentuk program atau kegiatan pembangunan lainnya.
2. Pemberdayaan masyarakat selalu melibatkan partisipasi masyarakat baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan yang dilakukan.
3. Dalam melaksanakan program pemberdayaan masyarakat, kegiatan pelatihan merupakan unsur yang tidak bisa dipisahkan dari usaha pembangunan fisik.
4. Dalam implementasinya, usaha pemberdayaan harus dapat memaksimalkan sumber daya, khususnya dalam hal pembiayaan baik yang berasal dari pemerintah, swasta maupun sumber-sumber lainnya.
5. Kegiatan pemberdayaan masyarakat harus dapat berfungsi sebagai penghubung antara kepentingan pemerintah yang bersifat makro dengan kepentingan masyarakat yang bersifat mikro.

(Sumaryadi, 2005: 94-96)

Dari Pemahaman mengenai konsep pemberdayaan diatas tidak bisa dilepaskan dari pemahaman mengenai siklus pemberdayaan itu sendiri, karena pada hakikatnya pemberdayaan adalah sebuah usaha berkesinambungan untuk menempatkan masyarakat menjadi lebih proaktif dalam menentukan arah kemajuan dalam komunitasnya sendiri. Artinya program pemberdayaan tidak bisa hanya dilakukan dalam satu siklus saja dan berhenti pada suatu tahapan tertentu, akan tetapi harus terus berkesinambungan dan kualitasnya terus meningkat dari satu tahapan ke tahapan berikutnya.

Beberapa prinsip mengenai Pemberdayaan Masyarakat juga dipaparkan secara lebih spesifik yang dapat dilakukan dalam Pemberdayaan Masyarakat, sebagai berikut:

1. Membangun relasi pertolongan yang: (a) merefleksikan respon empati; (b) menghargai pilihan dan hak klien menentukan nasibnya sendiri (self-determination); (c) menghargai perbedaaan dan keunikan individu; (d) menekankan kerjasama klien (client partnership).
2. Membangun komunikasi yang: (a) menghormati martabat dan harga diri klien; (b) mempertimbangkan keragaman individu; (c) berfokus pada klien; (d) menjaga kerahasiaan klien.
3. Terlibat dalam pemecahan masalah yang: (a) memperkuat partisipasi klien dalam semua aspek proses pemecahan masalah; (b) menghargai hak-hak klien; (c) merangkai tantangan sebagai kesempatan belajar;(d) melibatkan klien dalam pembuatan keputusan dan evaluasi.
4. Merefleksikan sikap dan nilai profesi pekerjaan sosial melalui: (a) ketaatan terhadap kode etik profesi; (b) keterlibatan dalam pengembangan professional; riset dan perumusan kebijakan; (c) penerjemahan kesulitan-kesulitan pribadi ke dalam isu-isu publik; (d) penghapusan segala bentuk diskriminasi dan ketidaksetaraan kesempatan.

(Dubois dalam Suharto, 2014:68)

Uraian di atas menjelaskan bahwa bagaimana masyarakat menempatkan dirinya sebagai aktor atau subyek yang kompeten dan mampu menjangkau sumber-sumber dan kesempatan-kesempatan yang ada disekitarnya. Tingkat

kepekaan terhadap satu sama lain dalam menghadapi sebuah masalah sangat dibutuhkan dalam sebuah aktivitas pemberdayaan masyarakat.

2.1.2 Pedagang Kaki Lima

PKL (Pedagang Kaki Lima) mempunyai pengertian yang sama dengan ”hawkers”, yang didefinisikan sebagai orang-orang yang menjajakan barang dan jasa untuk dijual di tempat yang merupakan ruang untuk kepentingan umum, terutama di pinggir jalan dan trotoar.

“Pedagang kaki lima ialah orang–orang dengan modal relatif kecil/sedikit berusaha (produksi–penjualan barang–barang/jasa–jasa) untuk memenuhi kebutuhan kelompok konsumen tertentu dalam masyarakat. Usaha itu dilakukan pada tempat–tempat yang dianggap strategis dalam suasana informal”. (Sudaryanti, 2000:8)

Dari uraian diatas disimpulkan bahwa Pedagang kaki lima adalah sekelompok aktifitas social yang menjajakan jualannya di jalan-jalan yang memang bukan semestinya terkadang PKL dipandang secara *illegal.* PKL tak pernah luput dari perhatian masyarakat hingga pemerintah kota karena mengganggu kenyamanan bagi pejalan kaki, membuat kumuh lokasi berjualan hingga kemacetan.

Perda Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan PKL, khususnya Pasal 1 ayat (29) PKL didefinisikan sebagai berikut:

> ”Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disingkat PKL adalah pedagang yang melakukan usaha perdagangan di sektor informal yang menggunakan fasilitas umum baik di lahan terbuka dan/atau tertutup dengan menggunakan

peralatan bergerak maupun tidak bergerak".
(Perda Kota Bandung No.4 Tahun 2011 tentang penataan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima).

Ini menjadi penting sebagai acuan untuk menciptakan situasi kondusif bagi penertiban dan pembinaan PKL agar tidak bertentangan dengan tata ruang wilayah Kota Bandung dan tetap selaras dengan aturan yang tertuang dalam Perda No.11 Tahun 2005 tentang Keindahan, Kebersihan, dan Ketertiban (K3). Dalam ketentuan Peraturan Daerah Kota Bandung No. 04 Tahun 2011 ini, bahwa untuk melaksanakan peraturan daerah ini perlu diatur lebih lanjut dengan peraturan pelaksanaan yang memuat mengenai tata cara penataan tempat, lokasi, waktu, jenis, tanda pengenal dan aksesoris pedagang kaki lima.

Menurut Perda No.04 Tahun 2011 pasal 6 ayat (1) bahwa wewenang Satuan Tugas Khusus yaitu mengatur, menata dan memberikan fasilitas kepada PKL. 29 Bidang penataan sebagaimana dimaksud pada pasal ayat 6 ayat (3), mempunyai tugas membantu Satuan Tugas Khusus dalam :

a. Melaksanakan penempatan dan penataan PKL di zona hijau dan/ zona kuning;
b. Melaksanakan penataan di lokasi PKL, tertentu yang berpotensi dijadikan objek wisata belanja;
c. Membuat dan memasang papan petunjuk dimasing-masing zona, yang pelaksanaannya dibantu oleh Camat dan Lurah setempat.

PKL sering menggelar dagangannya dipinggiran jalan, akan tetapi Keberadaannya sangat mengganggu kenyamanan bagi pengguna fasilitas umum dan juga mengganggu ketertiban kota. Karakteristik bentuk usaha PKL tersebut dapat memunculkan PKL baru di kawasan perkotaan. Berkembangnya PKL menciptakan suatu aktivitas PKL yang beragam setiap harinya. Aktivitas PKL timbul karena tidak terpenuhinya kebutuhan pelayanan oleh pemerintah. Pejabat

kota dan sebagian kaum elit lokal biasanya memandang PKL sebagai gangguan yang membuat kota menjadi kotor dan tidak rapi menyebabkan lalu-lintas macet, pembuangan sampah di sembarang tempat, gangguan bagi para pejalan kaki, pesaing pedagang toko yang terkena pajak besar.

Berdasarkan hal di atas dapat disimpulkan bahwa PKL sering berdatangan ke Kota-kota besar seperti Kota Bandung, disamping itu aktifitas PKL dinilai tidak berkontribusi terhadap pendapatan ekonomi Kota Bandung tetapi di sisi lain PKL menjadi masalah yang harus diselesaikan agar tertib dalam keindahan Kota Bandung. Pemkot bandung memberikan upaya berupa membina PKL kota bandung tanpa membinasakan. Upaya yang pemerintah lakukan bertujuan sebagai menata PKL.

2.2 Kerangka Pemikiran

Seiring dengan banyaknya PKL di Kota Bandung, Pemerintah Kota Bandung bersama Dinas Koperasi UMKM bekerjasama dalam memberdayakan PKL dengan cara merelokasi dengan pembinaan tanpa membinasakan PKL termasuk PKL *Skywalk* Teras Cihampelas, namun Dinas Koperasi UMKM memegang peranan penuh terhadap PKL *skywalk* Teras Cihampelas dalam proses pemberdayaan tersebut.

Kota Bandung merupakan salah satu pusat kegiatan Nasional sebagai kawasan dengan sektor unggulan UMKM, Industri, Jasa dan Pariwisata Pemkot Bandung dan Dinas Koperasi UMKM menata dan memberdayakan PKL terutama di jalan Cihampelas agar menjadi Kota yang bersih, tertib dan aman melalui

relokasi. Namun proses Pemberdayaan yang sudah diberlakukan mengalami kendala seperti hal nya dari segi program pemberdayaan PKL yaitu bimtek yang kurang mendapat apresiasi dari pedagang, fasilitas *Skywalk* Teras Cihampelas yang kurang terurus dan segi fasilitasi Permodalan dengan belum terbentuknya Koperasi simpan pinjam dengan bunga rendah agar memudahkan PKL meminjam modal tanpa harus berurusan dengan rentenir.

Ditinjau dari segi Bimbingan Teknis (bimtek). Ditinjau dari bimbingan teknis (bimtek) kurangnya kesadaran dari para pedagang terhadap pentingnya edukasi yang diberikan oleh Dinas. Alasan kurangnya antuasiasme pedagang karena mereka enggan untuk meninggalkan jualan mereka walau durasi bimtek hanya berlangsung setengah hari saja.

Permasalahan-permasalahan tersebut membuat pemberdayaan sedikit terhambat yang dilakukan Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung dalam memberdayakan PKL *Skywalk* Teras Cihampelas. Adanya kontra terhadap relokasi *Skywalk* Teras Cihampelas yaitu ketika pedagang di naikkan ke atas pendapatan mereka menurun, alasan penurunan keuntungan ini karena barang yang ditawarkan sama saja seperti yang ada di bawah, dan rata-rata pengunjung yang datang ke *Skywalk* Teras Cihampelas hanya sekedar berjalan-jalan dan berfoto aja, sehingga budaya meminjam uang untuk modal masih meminjam secara diam-diam kepada rentenir karena dari pihak dinas baru mengadakan Pra-koperasi saja karena terkendalanya dana untuk proses pembentukan koperasi.

Dan ditinjau dari segi fasilitas, fasilitas di *Skywalk* Teras Cihampelas kurang terurus, tanaman banyak yang mati, fasilitas toilet umum tidak terurus,

padahal untuk iuran petugas kebersihan berjalan terus, bahkan alat *charger* umum ada yang tidak berfungsi dengan baik.

Indikator keberhasilan Pemberdayaan Masyarakat yang dalam hal ini adalah PKL *Skywalk* Teras Cihampelas, dapat dilihat dari keberdayaan yang mereka terima. Pemberdayaan dapat berjalan dengan baik jika dapat memenuhi pendekatan pendekatan dari Pemberdayaan itu sendiri untuk mencapai tujuan pemberdayaan tersebut. Pendekatan Pemberdayaan yang dilakukan pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Koperasi UMKM mengalami beberapa kendala, itu semua merupakan tanggung jawab bersama antara Dinas Koperasi UMKM dengan PKL *Skywalk* Teras Cihampelas agar mencapai tujuan yang diinginkan.

Pada penelitian ini peneliti mengkaji dan menganalisis mengenai Pemberdayaan PKL *skywalk* Teras Cihampelas dengan menggunakan teori Suharto dengan pendekatan 5P yaitu: Pemunkinan, Penguatan, Perlindungan, Penyokongan, Pemeliharaan. Beranjak permasalahan diatas penulis teori Suharto penulis anggap cocok untuk menganalisis permasalahan tersebut menggunakan lima indikator pendekatan pemberdayaan yaitu:

1. Pemungkinan
   Menciptakan suasana atau iklim berupa program Bimtek yang memungkinkan potensi PKL cihampelas berkembang secara optimal dengan pembinaan SDM nya agar mampu bersaing dan memiliki jiwa inovatif dan kreatif.
2. Penguatan
   Memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki PKL cihampelas dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuh-kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian mereka.
3. Perlindungan
   Melindungi masyarakat terutama PKL agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang

(apalagi tidak sehat) antara yang kuat dan lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil. Kongkritnya dengan adanya program bimtek dari Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung yang bertujuan untuk memandirikan pedagang, memberi motivasi dan inovasi agar bisa menaikkan standar jualan agar tidak adanya persaingan, dan perekrutan oknum preman menjadi petugas keamanan sekitar *Skywalk* Teras Cihampelas.

4. Penyokongan
   Memberikan bimbingan dan dukungan melalui program bimtek agar PKL cihampelas merasa dibina tanpa membinasakan dan mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat miskin agar tidak terjatuh ke dalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.
5. Pemeliharaan
   Memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.

(Suharto, 2014:67-68)

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka peneliti membuat definisi operasional sebagai berikut :

1. Pemberdayaan adalah suatu kegiatan untuk memberi daya kepada PKL *skywalk* teras cihampelas agar bisa sejahtera dan mampu bersaing.
2. Pedagang Kaki Lima adalah pedagang dengan modal yang minim dan memiliki ciri berjualan dengan gerobak dorong dengan memanfaatkan bahu jalan sebagai tempat berjualan.
3. Dinas Koperasi UMKM kota Bandung merupakan dinas yang menangani kasus PKL, dengan bidang-bidang yang khusus menangani nya terdapat tiga bagian yaiu: Bidang promosi dan pemasaran, bidang fasilitas dan pemodalan, dan bidang pemberdayaan dan penataan.

4. Pemberdayaan PKL *Skywalk* Teras Cihampelas di Kota Bandung dapat dilihat pada tingkat keberhasilannya, meliputi :
    1. Pemungkinan: menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi PKL *Skywalk* Teras Cihampelas berkembang secara optimal. Pemungkinan tersebut meliputi:
        a) Menciptakan Suasana atau iklim adalah upaya Dinas Koperasi UMKM dan menciptakan suasana atau iklim usaha yang memungkinkan potensi PKL berkembang secara optimal.
        b) Menghilangkan sekat kultur dan struktur adalah upaya Dinas Koperasi UMKM menghilangkan sekat-sekat kultural dan struktural yang menghambat potensi PKL *Skywalk* Teras Cihampelas berkembang secara optimal.
    2. Penguatan: memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki PKL *Skywalk* Teras Cihampelas dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Penguatan tersebut meliputi :
        a. Memperkuat Pengetahuan adalah upaya Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung memperkuat pengetahuan yang dimiliki PKL *Skywalk* Teras Cihampelas.
        b. Memperkuat Kemampuan adalah upaya Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung menumbuhkembangkan kemampuan dari segi modal untuk menunjang kehidupan PKL tanpa bergantung kepada rentenir.
    3. Perlindungan: melindungi PKL *Skywalk* Teras Cihampelas terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat,

menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang (apalagi tidak sehat) antara yang kuat dan lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Perlindungan tersebut meliputi:

a) Melindungi masyarakat lemah adalah upaya Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung dan Ketua Forum PKL Cihampelas untuk melindungi PKL *Skywalk* Teras Cihampelas yang lemah agar tidak tertindas oleh pelaku yang kuat.

b) Penghapusan diskriminasi adalah upaya Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung dan Ketua Forum PKL Cihampelas untuk menghilangkan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan dalam persaingan para PKL *Skywalk* Teras Cihampelas.

4. Penyokongan: memberikan bimbingan dan dukungan agar PKL *Skywalk* Teras Cihampelas mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya. Penyokongan meliputi :

a) Memberikan Bimbingan adalah upaya Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung dan Ketua Forum PKL Cihampelas memberikan bimbingan dan arahan agar PKL *Skywalk* Teras Cihampelas mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya.

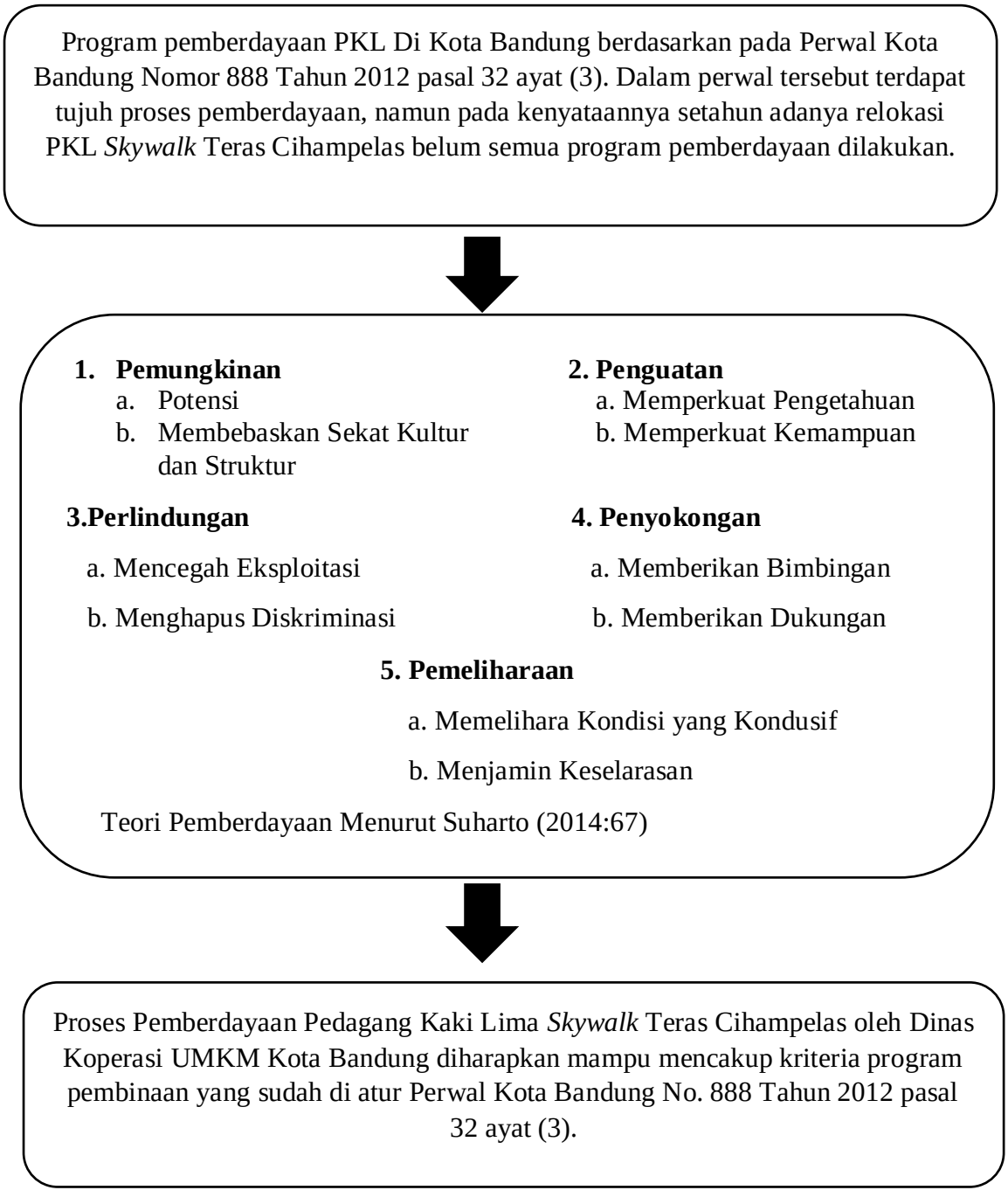
b) Memberikan Dukungan adalah upaya Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung dan Ketua Forum PKL Cihampelas dalam memberikan dukungan agar PKL *Skywalk* Teras Cihampelas tidak terjatuh ke dalam keadaan posisi yang semakin lemah.

5. Pemeliharaan: memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam ruang lingkup PKL *Skywalk* Teras Cihampelas. Pemeliharaan meliputi:
   a) Memelihara Kondisi yang kondusif adalah upaya Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung dan Ketua Forum PKL Cihampelas dalam memelihara kondisi yang tetap kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara PKL *Skywalk* Teras Cihampelas.
   b) Memelihara Keselarasan adalah upaya Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung dan Ketua Forum PKL *Skywalk* Teras Cihampelas dalam memelihara keselarasan PKL *Skywalk* Teras Cihampelas agar setiap pelaku tetap memperoleh kesempatan berusaha.

Berdasarkan keangka pemikiran diatas, maka peneliti memberikan model gambaran model kerangka pemikiran yang menjelaskan bahwa pemberdayaan yang mengikuti lima pendekatan yang di sebut diatas akan menghasilkan output yang baik kepada PKL *skywalk* Teras Cihampelas Kota Bandung yang di gunakan dalam model kerangka pemikiran sebagai berikut.

Gambar 2.2

Model Kerangka Pemikiran



(Hasil Olahan Peneliti, 2018)

2.3 Proposisi

Berdasarkan Uraian diatas maka proposisi penelitian ini adalah Pemberdayaan Masyarakat oleh Dinas Koperasi UMKM guna meningkatkan Pemberdayaan PKL *Skywalk* Teras Cihampelas Kota Bandung ditentukan oleh pendekatan pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan dan pemeliharan.